



Partai Mahasiswa dan Politik Oligarki di Indonesia

Student Party and Oligarchy Politics in Indonesia

Shohibul Anshor Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*E-mail: shohibulanshor@umsu.ac.id

Abstrak

Kajian ini menyoroti tentang berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) pada 21 Januari 2022. Sebagian besar dugaan analis politik menyakini hal ini sebagai bagian dari gerakan yang bertujuan memecah kekompakan untuk memperjuangkan tuntutan protes mahasiswa secara nasional. Namun, artikel ini ingin mendalami motif yang jauh lebih besar dari itu. PMI bukanlah sebuah partai politik biasa. Desain kolaborasi PMI dengan arus deras kekuatan politik identitas di balik metamorfosis Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945 yang sangat menentukan keberadaannya, tentu begitu penting untuk tak dipandang kecuali sebagai anomali demokrasi di tengah keterbelahan yang membahana terutama selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kata Kunci: Partai Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa, Politik Identitas, Oligarki, *World-System Perspective*

Abstract

This study focuses on the establishment of the Indonesian Student Party (PMI) on January 21, 2022. Most of the alleged political analysts believe that this is part of a movement that aims to break solidarity to fight for student protests demands nationally. However, this article wants to explore a much bigger motive than that. PMI is not an ordinary political party. PMI's collaboration design with the strong current of identity politics behind the metamorphosis of the 1945 Indonesian Christian Party (Parkindo) which greatly determined its existence, is of course very important not to be seen except as a democratic anomaly in the midst of the divisions that flared up, especially during the leadership of President Joko Widodo.

Keywords: *Student Party, Student Movement, Identity Politics, Oligarchy, World-System Perspective.*

Cara citasi : Siregar, Shohibul Anshor. (2022). Partai Mahasiswa dan Politik Oligarki di Indonesia. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 3 No 2 September 2022*, halaman 87-107

PENDAHULUAN

Tentu amat sulit menafikan pendirian Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) sebagai bagian dari gerakan yang bertujuan memecah kekompakan untuk memperjuangkan tuntutan protes mahasiswa secara nasional. Hampir semua analis politik meyakini hal itu. Tetapi, jauh lebih besar dari motif itu, kuat dugaan bahwa PMI yang secara mengejutkan didirikan pada 21 Januari 2022 bukanlah sebuah partai politik biasa. Misi di baliknya jauh lebih besar dari sekadar ingin mencapai tujuan jangka pendek mengamankan pemerintahan Joko Widodo dari ancaman protes mahasiswa Indonesia. Karena itu, dengan mencermati proses pendiriannya, patut diduga bahwa kehadiran mendadak sontak PMI bukanlah fenomena demokrasi lazim yang bertujuan sekadar untuk mengakomodasi kaum dewasa muda dalam ruang partisipasi politik.

PMI sangat berbeda dengan partai-partai yang sudah ada, dan tentu akan menjadi sangat naif jika pendiriannya hanya dikaitkan dengan hal tidak masuk akal terkait fakta sumberdaya yang sangat terbatas pada mahasiswa. Tentu saja jika pendirian PMI hanya dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek belaka, memecah kekuatan mahasiswa Indonesia, skenario itu hanya dapat disebut sebagai tipuan belaka dengan melambungkan angan-angan dan potensi haus kekuasaan kaum dewasa muda.

Pendirian PMI sangat masuk akal untuk ditandai sebagai peluang konstitusional dalam kaitan fasilitasi kondisi dan batas minimum capaian hasrat demokrasi Indonesia yang belum mau beranjak dari pengarusutamaan target prosedural belaka.

Tulisan ini akan berusaha melihat beberapa hal yang sangat terbuka untuk disorot, terutama tentang misi utama pendirian. Desain kolaborasi PMI dengan arus deras kekuatan politik identitas di balik metamorfosis Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945 yang sangat menentukan keberadaannya, tentu begitu penting untuk tak dipandang kecuali sebagai anomali demokrasi di tengah keterbelahan yang membahana terutama selama kepemimpinan Joko Widodo.

METODE PENELITIAN

Makalah ini ditulis menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai studi pustaka yang ada. Penelitian dilakukan berdasarkan karya tulis yang diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Dalam penelitian ini, penelusuran kepustakaan tidak hanya merupakan langkah awal dalam menyusun kerangka penelitian (*research design*)

tetapi sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi dan Ancaman terhadap Kampus

1.1. Mahasiswa dan Golongan Putih

Masih ingat Golongan Putih (Golput)? Sebuah penamaan atas gerakan protes mahasiswa dan dewasa muda menentang pelaksanaan Pemilu 1971 (Pemilu pertama era Orde Baru). Diksi “putih” bermakna dorongan mencoblos bagian putih pada surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jenis Golput dipilah menjadi Golput Teknis, Golput Pemilih Hantu, Golput Pragmatis, Golput Politis, dan Golput Ideologis. Golput Teknis ialah kegagalan menyalurkan hak pilih karena tidak bisa datang ke TPS, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau nama pemberi suara tidak terdaftar sebagai pemilih. Disebut Golput Pemilih Hantu (*ghost voter*) karena nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memenuhi syarat (sudah meninggal, terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain). Golput Pragmatis dimaksudkan ketika orang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi manfaat langsung. Juga karena merasa tak akan berpengaruh atas perubahan yang didambakan. Jenis Golput Politis dengan karakteristik umum percaya pada negara dan Pemilu, meski tak merasa memerlukan berhubung kandidat-kandidat kontestatif dinilai tidak mampu memahami aspirasi mereka. Sementara Golput Ideologis tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang berlaku. Dalam pandangan kelompok ini negara lebih menunjukkan diri sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan kedaulatan rakyat hanya hiasan semantik belaka.

Fenomena Golput sama sekali tak dapat dilepaskan dari konteks sejarah protes mahasiswa global sekitar tahun 1960-an yang letusannya diakui semua pihak (Klimke, 2010). Laporan Central Intelligence Agency (CIA), “*Restless Youth: The CIA, Socialist Humanism, and Yugoslavia’s 1968 Student Protests*” yang terbit September 1968, juga menyatakan hal yang sama. Kerusuhan di Berlin Barat, Paris dan New York, dan aksi duduk di lebih dari dua puluh negara lain selama beberapa bulan, mengglorifikasi aktivis mahasiswa dalam perhatian besar dunia.

Dewasa muda memberontak terhadap apa yang mereka lihat sebagai nilai-nilai dan praktik politik tradisional yang sudah ketinggalan zaman, sembari mengungkapkan

kesenjangan sosial yang semakin lebar. Gerakan tahun 1960-an bahkan melampaui tembok tebal pembatas ideologis perang dingin, karena bukan hanya "Dunia Pertama" kapitalisme Barat yang menjadi sasaran, tetapi juga "Dunia Kedua" dari blok Komunis dan "Dunia Ketiga" di Amerika Latin, Afrika, dan Asia.

Menggambarkan protes tahun 1960-an sebagai sebuah revolusi dalam sistem dunia, Martin Klimke mengutip ucapan pemimpin mahasiswa Prancis (Daniel Cohn-Bendit): *"Paris, Berlin, Frankfurt, New York, Berkeley, Roma, Praha, Rio, Mexico City, Warsawa, semua tempat itu adalah arena pemberontakan yang membentangi di seluruh dunia dan merebut hati dan impian seluruh generasi. Tariq Ali, pemimpin mahasiswa dari Inggris, bahkan menyamakan dampak gerakan protes tahun 1960-an itu dengan badai, yang melanda dunia tak terkecuali banyak negara di Asia, Eropa, dan Amerika"*.

Ingatlah ketika 26 Oktober 1963, di Amherst College, John F. Kennedy berkata bahwa *"orang-orang yang menciptakan kekuasaan memberikan kontribusi yang sangat diperlukan bagi kebesaran bangsa. Tetapi orang-orang yang mempertanyakan kekuasaan memberikan kontribusi yang sama pentingnya. Karena merekalah yang menentukan apakah kita menggunakan kekuasaan atau kekuasaan menggunakan kita"*.

Mayoritas mahasiswa Indonesia yang dahulu memimpin gerakan Golput, dan mahasiswa Indonesia saat ini, rasanya dapat setuju pendapat John F.Kennedy. Golput, apalagi Golput Ideologis, pasti membengkak di tengah kepercayaan kepada sistem yang terus memburuk dan ketidakpastian nasib bangsa semakin menjadi-jadi.

Betul bahwa gerakan protes mahasiswa penuh dengan ancaman keselamatan diri secara tegas tak menafikannya. Seperti yang ditulis Hunter Stockton Thompson:

"Anda (wahai penguasa, pen) bisa membuat percikan api di mana saja (menentang gerakan, pen). Ada pengertian universal yang fantastis bahwa apa pun yang kami lakukan benar, bahwa kami berhak menang..... rasa kemenangan yang tak terhindarkan atas Kekuatan Lama dan Jahat. Kami memiliki semua momentumnya; kami berselancar di atas puncak ombak yang tinggi dan indah..." (Thompson, 1971).

Ucapan bernas dari Rudi Dutschke saat wawancara TV, 3 Desember 1967 tampaknya memiliki bumi berpijak di hati mahasiswa Indonesia hari ini:

"Kami bukan idiot sejarah yang putus asa....kami dapat menciptakan dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya; dunia yang membedakan dirinya dengan tidak mengenal perang lagi, dengan tidak lapar lagi, di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan bersejarah kita..." (dalam Cornils, 2014: 107).

Karena itu terpaan yang diterima oleh gerakan mahasiswa Indonesia justru akan dapat mempertinggi motivasi juang meski bagian ini benar-benar merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh bagian lain yang berhasil dibujuk masuk ke Partai Mahasiswa Indonesia (PMI). Dewasa muda yang kecewa, dan bahkan terkadang merasa harus mengorganisasikan kemarahan, tidak mungkin mempertimbangkan pilihan politik ketika mereka merasa sistem sudah begitu buruk. Dalam kasus Indonesia nyaris tiadanya partai politik yang terpercaya yang malah menyerahkan pengabdian nasib buruk demi koalisi, cukup signifikan membentuk resistensi jika bukan perlawanan.

Problem keterbelahan mahasiswa Indonesia saat ini berakar pada pragmatisme yang bisa dibentuk oleh kekuasaan pada kubu yang sesungguhnya begitu terkejut ketika mendadakontak merasa telah bisa dengan begitu mudahnya naik kelas menjadi calon-calon penguasa yang (berharap) tak lama lagi akan berkolaborasi dengan oligarki.

Jurgen Habermas (1970) menawarkan tiga penjelasan yang secara metodologis memungkinkan untuk lebih memahami mahasiswa sebagai warga negara istimewa karena protes mereka. *Pertama*, mahasiswa yang protes adalah kelompok istimewa di tengah masyarakat dan zamannya. Mereka tidak memajukan kepentingan yang dapat saja dinegosiasikan. Sebagian besar tidak berasal dari golongan mahasiswa yang bergerak ke atas.

Kedua, untuk alasan yang masuk akal, legitimasi yang ditawarkan oleh sistem politik tampaknya tidak cukup meyakinkan kelompok ini. Program pengganti negara kesejahteraan untuk ideologi borjuis yang bobrok mengandaikan status dan orientasi pencapaian tertentu. Justru, jika dibandingkan dengan mahasiswa lain, para aktivis mahasiswa ini kurang tertarik pada karir profesional dan masa depan keluarga. Prestasi akademik mereka, yang cenderung di atas rata-rata, dan asal-usul sosial mereka tidak mempromosikan cakrawala harapan yang ditentukan oleh urgensi yang diantisipasi dari angkatan kerja. Aktivis yang relatif lebih sering terbiasa dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, cenderung kebal terhadap kesadaran teknokratis karena, meskipun untuk berbagai motif, pengalaman mereka dalam karya intelektual mereka sendiri tidak sesuai dengan asumsi teknokratis dasar yang digembar-gemborkan.

Ketiga, di antara kelompok ini, konflik tidak dapat pecah karena luasnya disiplin dan beban yang diemban. Mahasiswa tidak berjuang untuk ketakutan yang lebih besar dan imbalan sosial dalam kategori umum, karena pada sisi tertentu protes mereka malah lebih ditujukan terhadap kategori penghargaan itu sendiri.

Ada pendapat bahwa jumlah kekayaan sosial yang dihasilkan oleh kapitalisme industri maju dan kondisi teknis dan organisasional tempat diproduksinya semua kekayaan itu membuat semakin sulit untuk menghubungkan penetapan status dengan cara yang meyakinkan secara subjektif dengan mekanisme evaluasi pencapaian individu.

Oleh karena itu, dalam jangka panjang, protes mahasiswa dapat secara permanen menghancurkan ideologi pencapaian yang runtuh ini. Dengan demikian juga sekaligus meruntuhkan dasar legitimasi kapitalisme maju yang sudah rapuh.

1.2. Politik Regenerasional

Mahasiswa selalu dapat menjadi kekuatan kreatif dan sumber inovasi dinamis. Jika mereka selalu hadir, berkontribusi, dan bahkan berusaha mengkatalisasi perubahan penting, apa pun risikonya, maka sejarah akan selalu memandangnya sebagai keniscayaan fungsional belaka.

Sejarah juga menuntun kemampuan mereka memilih dengan akurat sasaran tembak untuk diruntuhkan. Dalam kasus-kasus berisiko besar semisal perombakan sistem politik, koreksi pembagian kekuasaan, dan juga penciptaan peluang-peluang distribusi ekonomi berkeadilan, sebagaimana jamak terjadi di berbagai negara, pengorbanan mereka sangat luar biasa. Selalu indah untuk dicatat, baik sebagai sejarah lokal maupun monumen heroisme universal yang terus membimbing moral dan nalar.

Karena sifatnya yang selalu potensial menginterupsi kekuasaan itu, model partisipasi dewasa usia muda selalu menjadi salah satu pusat perhatian krusial di seluruh dunia. Berbagai kecenderungan kebijakan yang dikhususkan untuk penciptaan ruang partisipasi khusus bagi mereka kerap lebih diboboti kepentingan politik yang berayun di antara dua ufuk diametral.

Pada satu ufuk mereka harus dijejali harapan untuk lebih siap menjawab tantangan masa depan dibanding generasi yang akan mereka gantikan. Tetapi, paradoksnya, pada ufuk lain, kebijakan kerap lebih menekankan pentingnya obsesi generasi pembuat kebijakan untuk pengabdian kekuasaan. Peran fungsional dan subjektif dalam sejarah peradaban dengan keniscayaan pendobrakan bahkan sama sekali tidak dihitung oleh kebijakan.

Karena itu sarana dan pelebagaan partisipasi politik mahasiswa kerap menjadi mekanisme berintikan pencabangan tak resmi kekuasaan politik yang sangat potensial menjauhkan dari realitas kehidupan yang mestinya menjadi identitas mereka. Tetapi di samping kebijakan-kebijakan itu memiliki tingkat keberhasilan tertentu berkat jejaring

pengendalian yang luas, selalu ada kemungkinan variasi atensi, panggilan dan loyalitas, atau bahkan pembangkangan serius, mulai dari yang bersifat sembunyi-sembunyi sampai yang akhirnya mengkrystal dengan keberanian berterus terang.

Keberanian membangkang mengotomasisasi pengkategorian mereka sebagai kelompok istimewa. Kemewahan nilai utama mereka adalah pada fakta tidak memajukan kepentingan adhock dan pribadi meski pun peluang menegosiasikannya sangat terbuka (Habermas, 1970).

Pilihan kebijakan *bipolar and segmentation process* (politik belah bambu) adalah hal yang amat populer sepanjang masa meski banyak kegagalan penerapannya. Jurgen Habermas melihat sebuah alasan yang masuk akal dalam kegagalan itu, yakni legitimasi. Sistem politik yang tidak cukup meyakinkan sangat menonjol dan mereka pun sangat sadar akan diabadikan sebururuk apa kelak oleh sejarah.

Tak hanya rasionalitas yang berbicara, tetapi juga, terutama, idealisme. Dalam berbagai kasus protes mahasiswa yang ditelaah Jurgen Habermas, saat memperbandingkan program karitatif dan etalatif pengganti konsepsi negara kesejahteraan untuk pelestarian ideologi borjuis yang bobrok dan sekaligus mengandaikan status dan orientasi pencapaian tertentu yang dipandang sangat tak mulia, misalnya, resistensi meluas.

Berkat pengalaman sejarah, mahasiswa ini akhirnya sangat mahir menghindari konflik antar kelompok, sebuah capaian yang mengkonfirmasi tingkat keprihatinan yang mengkondisikan kemunculan solidaritas. Mereka terlatih memahami bahwa irama perjuangan tidak dikendalikan oleh ancaman yang tak terperikan. Juga bukan oleh bayangan imbalan-imbalan sosial, ekonomi dan politik dari penguasa.

Obsesi generasi pembuat kebijakan kerap ditentang meski mereka lazim terbelah. Sebagiannya dapat menjadi komponen hipokrit. Lama kelamaan mahir menyembunyikan fakta-fakta menyimpang, berapologi merasionalisasi pengingkaran atas idealitas.

Lazimnya titik-titik genting transisi sejarah politik dan kekuasaan Indonesia selalu potensil memunculkan kelompok mahasiswa yang berbicara atas nama dan untuk kepentingan kekuasaan. Bahkan dapat dalam bentuk penyertaan mereka dan pengukuhan kekuasaan baru dengan legitimasi yang terbukti lemah atau terus melemah sesuai perjalanan waktu. Tujuan rekrutmen mahasiswa sebagai prasyarat legitimasi selalu bermakna kooptasi yang berakhir deviatif.

Jika analisis diperluas, fenomena-fenomena transisi kekuasaan politik di Indonesia hanyalah bagian dari lakon kekuasaan imperialisme global sebagaimana ditegaskan Alvin Y. So (1990). Ketika Amerika Serikat menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia II, para ilmuwan sosial dengan pembiayaan sangat besar ditugasi mempelajari masalah-masalah pembangunan Dunia Ketiga. Hasilnya menjadi awal bagi mazhab modernisasi yang mendominasi wacana pembangunan pada 1950-an. Transisi ini menandai berakhirnya Pax Britanica oleh hegemoni Pax Americana.

Pax Americana menawarkan program modernisasi. Segera mendapat tantangan dari Amerika Latin yang sejak era 1960-an tercatat menjadi awal kemunculan mazhab ketergantungan neo-Marxis. Mazhab yang sangat kritis ini terus menuding mazhab modernisasi tak lebih dari rasionalisasi dan apologi tak bermoral atas kemaharajalelaan imperialisme.

Ketika pertengahan 1970-an pertempuran ideologis antara mazhab modernisasi dan mazhab ketergantungan mulai mereda dan perdebatan pembangunan Dunia Ketiga menjadi kurang ideologis dan emosional, Immanuel Wallerstein (1964; 1967; 1979; Ragin dan Chirot, 1984, dalam So, 1990: 171) mengembangkan perspektif baru Sistem Dunia (*World-System Perspective*). Dengan kritik tajam atas paradigma keilmuan sosial yang menjajah, Wallerstein berusaha merebut imajinasi generasi baru sosiolog dan memberikan dampak mendalam pada disiplin sosiologi (Chirot dan Hall, 1982 dalam So, 1990: 171).

Dalam perubahan besar dunia itu Indonesia terus menjadi bagian penting dari perbenturan tanpa kemampuan memberi alternatif yang lebih menjanjikan bagi kemaslahatan dunia sebagaimana misi pendirian negara tahun 1945 (hapuskan penjajahan, lindungi penduduk dan wilayah, majukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa dan jangan absen dalam upaya diplomasi perdamaian dunia). Malah Indonesia menyambut imperialisme baru itu antara lain dengan mengadopsi gagasan W. W. Rostow tentang perencanaan pentahapan pembangunan (1960) melalui sejumlah mahasiswa yang setelah kembali ke Indonesia dijuluki sebagai Mafia Berkley (1970-an).

Telah sejak etape-etape awal pasca Perang Dingin (*Cold War*) Pax Americana ditantang oleh kemunculan fenomena ekonomi baru ke arah pembentukan Pax Sinica dengan kehadiran negara-negara pengalter dari Timur, khususnya China. Tetapi China dengan “program new khilafahnya”, *One Belt One Road* (OBOR), yang kemudian berubah

menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI) itu terbentur oleh wabah borderless, Covid-19. Mereka letih, jika tak babak belur.

Dengan kesulitan itu ada perlambatan perluasan dan cengkeraman “program new khilafah BRI China”. Namun Indonesia tetap canggung memainkan kualitas loyalitas di antara Pax Americana yang meredup dan Pax Sinica yang bergeliat, apakah melalui ASEAN, G20 dan instrument-instrumen tersedia lainnya.

Di tengah ketidakmenentuan polarisasi dunia terlebih setelah serbuan militer Rusia ke Ukraina tanpa mengindahkan kewibawaan NATO, fenomena baru Pax Covidica terlihat sebagai keniscayaan belaka pasca wabah yang merontokkan tatanan dunia itu. Tetapi perubahan-perubahan apa pun yang terjadi pastilah akan menjadi tema pergulatan baru untuk ditunggangi sesuai kepentingan negara-negara pendikte.

Oligarki adalah kekuatan siaga dalam menata dunia. Bisa hadir berbicara atas nama kemanusiaan, kesetaraan, pluralitas, keadilan dan kemaslahatan. Rapih menyembunyikan motif, oligarki bisa mengikat semua harsat dalam simpul dan kemas keluhuran demokrasi. Mereka gandrung membiakkan pemberontak-pemberontak lokal yang lucu-lucu, dengan penyakit kesenangan mencaci diri sendiri, sejarah dan nenkmoyang sendiri. Semua untuk mainan baru oligarki berkedok demokrasi.

Pax Covidica sebagai wadah strategis oligarki akan terus menegaskan tatanan baru. Untuk Indonesia, bergelantung di antara hegemoni Pax Americana yang meredup dan Pax Sinica yang rontok prematur, digantikan oleh arena baru Pax Covidica, adalah sebuah tantangan sejarah dan heroisme sekaligus.

Terasa usul pengabdian terbatas jabatan Presiden Joko Widodo dan atau penambahan masa jabatan seorang Presiden melalui amandemen UUD 1945, diakui atau tidak, adalah bagian serius dari perbenturan dikte pengaruh Pax Americana, Pax Sinica dan Pax Covidica sekaligus.

Memobilisasi dukungan mahasiswa untuk kepentingan oligarki adalah hal yang secara politik sangat strategis dan berpeluang besar. Tak hanya untuk mengawal kepentingan mempertahankan jabatan kepresidenan Joko Widodo yang terus diteriakkan untuk mundur, tetapi pelembagaan kemahasiswaan sebagai mekanisme saluran resmi politik kekuasaan negara adalah sebuah catatan baru dalam sejarah politik dunia.

Mengapa begitu khas dinamika periode kedua Joko Widodo? Banyak keterangan untuk itu. Tetapi Indonesia sangat penting bagi oligarki dunia dan oligarki lokal yang ingin keabadian bagi status istimewa yang mereka nikmati semasa kolonial.

Dilahirkannya Partai Mahasiswa Indonesia adalah penjelasan yang amat baik tentang dewasa muda yang hanyalah sebuah penamaan generasional sarat bobot politik. Jika sebagian mereka berekspresi kontra idealis, sebaiknya sejarah pun mengabadikan. Bagaimana interaksi mereka dengan kekuasaan dominan yang kemudian mampu merubah kelompok penyimpangan ini menjadi musuh keadilan, semestinya harus selalu dicatat oleh sejarah sebuah bangsa.

1.3. Perampasan Kebebasan Akademik

Inilah saatnya bagi semua institusi untuk berkomitmen pada pendekatan yang lebih konsisten yang menunjukkan rasa hormat terhadap kebebasan berbicara, kebebasan akademik, dan kebebasan sipil untuk semua anggota komunitas akademik, terlepas dari pandangan atau silsilah politik mereka.

Donald Alexander Downs (2005) berterus terang. Masalah utama kampus di negaranya (Amerika) adalah perampasan kebebasan berbicara, proses hukum, dan kebebasan sipil dasar lainnya. Hal itu dipertentangkan sedemikian rupa dengan tujuan politik yang disukai (oleh rezim).

Downs menganalisis sifat dan evolusi masalah, mendiskusikan bagaimana pengkhianatan atas kebebasan merusak misi pencarian kebenaran kampus. Ia membuka pikiran bagi yang (masih) tertarik dengan status pendidikan tinggi, nasib kewarganegaraan konstitusional, politik kebebasan sipil dan kaitan antara hukum dan politik. Alih-alih mempromosikan rasa hormat dan toleransi terhadap keragaman, kebijakan yang membatasi kebebasan akademik dan kebebasan sipil telah terbukti memecah. Juga mengkompromikan pertukaran gagasan yang merugikan kondisi penting dari pendidikan yang bermakna.

Downs menggambarkan perlawanan politik dan mobilisasi fakultas dan mahasiswa. Gerakan-gerakan semacam itu membawa hasil, sedangkan ketidakhadiran gerakan serupa berakibat penurunan penghargaan atas prinsip-prinsip kebebasan akademik. Downs yakin mobilisasi politik dan checks and balances di kampus dapat memulihkan kebebasan yang hilang karena dampak penerapan sensitivitas nasional di atas kepentingan mengejar kebenaran. Perbedaan dapat dibuat oleh politik dan bagaimana nasib prinsip-prinsip dasar konstitusi pada akhirnya ditentukan oleh keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang relevan dalam menghadapi tekanan.

Kemenduaan pengelolaan kebijakan kerap terjebak artikulasi buruk makna aspirasi manusia. Politisasi pengambilan keputusan terlalu sering membatasi debat publik. Dominasi pengaruh kepentingan partisan hanya memungkinkan sedikitnya inovasi sosial untuk memahami sifat dan solusi yang mungkin untuk masalah publik utama.

Ancaman yang bermunculan di kampus-kampus Amerika hadir dalam gelombang reformasi progresif yang dilembagakan akhir 1980-an dan 1990-an. Reformasi paling penting ialah kebebasan bicara, anti-pelecehan, program orientasi yang didedikasikan untuk mempromosikan ideologi kepekaan, dan prosedur dan tekanan baru dalam adjudikasi pelanggaran mahasiswa dan fakultas. Semua dirancang untuk menumbuhkan kesopanan, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman ras dan budaya. Namun terbukti berdampak pada konsekuensi yang anti atas watak asli Amerika, liberalitas.

Bagi Downs, fakultas, mahasiswa, dan bahkan administrator kampus dapat mengambil kembali kebebasannya melalui komitmen dan mobilisasi politik sembari menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan dan individualisme dapat dipulihkan dengan integritas dalam mengindahkan keragaman.

Kampus telah lama terlibat dalam program penelitian industri dan pemerintah. Kemanfaatannya tidak diragukan selain pasti dengan sendirinya membawa uang yang dibutuhkan ke universitas. Tetapi, diakui atau tidak, untuk meraih manfaat kecil harus selalu dibayar dengan harga sangat mahal. Banyak universitas terlibat dalam penelitian dengan lembaga pemerintah dan perusahaan yang mengharuskan untuk tetap diam tentang sifat penelitian. Meskipun dapat dimengerti dalam konteks tertentu, tetapi perluasan perintah pembungkaman sangat merugikan bagi gagasan universitas yang demokratis (Sommer, 1995).

1.4. Isu Terorisme Pasca-911

Kebebasan akademik dan intelektual juga terancam oleh sumber lain, terutama isu terorisme pasca 11 September. Terorisme memang ancaman, namun kapitalisasinya telah mengarah pada konsistensi tekad menghancurkan tatanan kebebasan kampus dan juga dunia sebagaimana dikemukakan Benno Schmidt yang lebih yakin bahwa Amerikalah penjahat sesungguhnya di dunia. "Kebebasan untuk menantang dan mengutarakan pendapat [adalah] kondisi yang tak tergantikan dari universitas mana pun yang layak disebut." (AAUP, 2003).

Tidak seorang pun harus diberi sanksi karena mengatakan hal kontroversial di forum yang sesuai. Tetapi susunan kekuasaan baru yang dikumpulkan pemerintah dalam

perang melawan teror memberi bukti tentang efek langkah-langkah represif pada kemerosotan kebebasan akademik dan intelektual untuk alasan kewaspadaan.

Regulasi secara signifikan memperluas kekuasaan pemerintah hingga mewadahi niat dan program mencari dan mensurvei kelompok dan individu politik di kampus dan di tempat lain atas nama keamanan nasional. Juga memperluas kategori materi dan penelitian yang “terklasifikasi” dan “tidak terklasifikasi tetapi sensitif” (Cole dan Dempsey, 2002). Juga mengotomatisasi peningkatan kekuatan Biro Investigasi Federal dan Badan Intelijen Pusat, termasuk untuk melakukan pencarian dan pengawasan domestik atas nama keamanan nasional.

Downs berusaha melihat secara adil dengan mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan mempertahankan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh berubah sama sekali mengingat bahaya yang dihadapi negara. Tetapi FBI telah menunjukkan pada masa lalu bahwa ia bahkan menikmati kesempatan luas menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang ditunjukkan oleh model-model pengawasan atas aktivis yang dilakukan pada 1960-an dan awal 1970-an tanpa alasan yang benar tentang bahaya keamanan nasional.

Masih segar dalam ingatan bahwa kelompok antiperang, aktivis hak-hak sipil, radikal kampus, dan bahkan aktivis lingkungan termasuk di antara target program FBI yang dikenal sebagai COINTELPRO atau program kontra intelijen (Cole dan Dempsey, 2002). Jejak Richard Nixon terdeteksi memerintahkan pencarian dan pengawasan semacam itu dengan kedok yang dibuat-buat, yakni keamanan nasional (Kutler, 1992).

Tidak seperti ancaman yang dibuat dalam imajinasi Richard Nixon dan COINTELPRO, sekiranya pun sejumlah kelompok teror tetap menjadi ancaman, dan pemerintah berhak memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memerangi ancaman itu daripada yang dimilikinya untuk memerangi kejahatan biasa, namun tidak seharusnya memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah. Regulasi baru memperluas definisi terorisme di luar ketentuan sebelumnya untuk mencakup hampir semua kelompok yang melakukan atau merencanakan kekerasan atau perusakan property (Downs, 2005).

Dalam pendekatan sebelumnya, pemerintah membatasi ruang lingkup definisi terorisme pada daftar pendek kelompok yang ditunjuk oleh menteri luar negeri. Definisi baru diterapkan pada kelompok advokasi politik dalam negeri yang melakukan pembangkangan sipil yang tidak ada hubungannya dengan jenis terorisme internasional yang kini mengancam bangsa.

Karena alasan ini pertempuran baru atas kebebasan berbicara terkadang mengambil karakteristik perang saudara. Sensor progresif memiliki cara untuk menghasilkan konsekuensi represif yang tidak liberal yang sama merugikannya dengan universitas dan pikiran terbuka seperti bentuk sensor tradisional. Dengan kembalinya ancaman yang lebih tradisional terhadap pemikiran bebas setelah 11 September, ada kemungkinan para pendukung sensor progresif akan menyadari kesalahan kelak setelah kerugian besar terjadi berlama-lama. Institusi pendidikan tinggi terus melakukan represi terhadap ujaran dan gagasan yang dianggap bertentangan dengan ideologi kepekaan yang bersembunyi di balik regulasi tentang ujaran kebencian dan pelecehan (Downs, 2005).

Pada abad kedua puluh ancaman terhadap kebebasan berbicara di kampus dan kebebasan akademik sebagian besar datang dari luar institusi pendidikan tinggi yang sayangnya diamini kampus. Pada akhir 1980-an mereka mengubah pola, muncul dari sumber-sumber kiri di dalam menara gading.

Apapun masalahnya, inilah saatnya bagi semua institusi untuk berkomitmen pada pendekatan yang lebih konsisten yang menunjukkan rasa hormat terhadap kebebasan berbicara, kebebasan akademik, dan kebebasan sipil untuk semua anggota komunitas akademik, terlepas dari pandangan atau silsilah politik mereka.

Menerima tanggung jawab ini berarti mengatasi ancaman terhadap kebebasan akademik dan intelektual yang berasal dari penyebab dan sumber di dalam universitas, bukan hanya yang muncul dari luar, seperti halnya dengan ancaman yang berasal dari perang melawan terorisme.

2. PMI dan Parkindo: Metamorfosis

2.1. Struktur PMI

PMI telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI No M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parkindo 1945 menjadi PMI. Juga tercantum sebagai salah satu dari 75 partai politik di Indonesia (Surat Kemenkumham No M.HH-AH.11.04-09 yang diteken oleh Yasonna Laoly).

Pengurus inti PMI terdiri dari Eko Pratama (Ketua Umum), Mohammad Al Hafiz (Sekretaris Jenderal), Muhammad Akmal Mauludin (Bendahara Umum), Teguh Stiawan, Davistha A dan Rican (masing-masing Ketua dan anggota Mahkamah).

Siapakah mereka dan di mana saja mereka kuliah? Cara paling baik untuk mendapatkan data tentang mereka adalah situs resmi pemerintah, dalam hal ini https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa/ dan tautan-tautan terkait lainnya yang untuk kepentingan tulisan ini telah diakses tanggal 8 Mei 2022 pukul 07.23-08.00 WIB.

Eko Pratama adalah alumni S-1 Pendidikan Dokter Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mohammad Al Hafiz lulusan S-1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau, angkatan 2014.

Pada situs yang sama terdapat dua nama Muhammad Akmal Mauludin. Pertama, mahasiswa S-1 Pendidikan Jasmani STKIP Purwakarta yang terdaftar sejak tahun 2019. Kedua, alumni S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka. Data yang tercantum pada situs yang sama tentang Teguh Setiawan adalah mahasiswa S-1 angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional.

Tetapi situs ini tidak memiliki data mahasiswa dan alumni bernama Davistha A, meski terdapat dua nama Davistha Shifa Azizah. Pertama, mahasiswa D-4 Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang terdaftar sejak tahun 2019 . Kedua, Davistha Shifa Azizah, alumni D-1 Program Studi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, terdaftar tahun 2020 .

Kemudian pada situs PPDikti Kemendikbudristek, pencarian atas nama 'Rican' di address <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/Rican,%20mahasiswa>, terdapat pula dua nama Rican di antara 30 data mahasiswa yang memiliki nama tunggal, nama awal, nama tengah dan nama akhir Rican. Mereka adalah Rican, alumni S-1 Pendidikan Biologi Universitas Abulyatama yang terdaftar (pindahan) tahun 2015 . Sedangkan Rican lainnya mahasiswa S-1 program Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara yang sudah dikeluarkan tahun 2006.

Syarat pendirian partai politik menurut UU No 2 Tahun 2011 sangat berat. Untuk lolos verifikasi sebagai peserta pemilu sebuah partai selain harus memiliki kepengurusan pada 34 provinsi juga harus memiliki kepengurusan pada 75% dari jumlah kab/kota dan kepengurusan pada 50% dari jumlah kecamatan di kab/kota.

Tentu tak begitu sulit memenuhi prasyarat penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi & kab/kota. Bagaimana dengan syarat memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau

1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol kab/kota yang harus dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP Elektronik di tingkat kecamatan? Hal itu tentu tidak perlu dipermasalahkan jika menyadari kedahsyatan kekuatan mesin politik tangan besar di belakang PMI.

2.2. Metamorfosis Parkindo

Dengan lambang lilin menyala berlatar belakang pohon natal, Parkindo adalah partai politik Indonesia sejak berdiri tahun 1945 hingga difusikan oleh pemerintahan Orde Baru ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1973.

Dahulu Parkindo memiliki penerbitan-penerbitan seperti majalah Kemudi dan Sinar Harapan yang terbitan perdananya pada 27 April 1961. Juga memiliki think tank seperti Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI). Segmen pelajar, mahasiswa, pemuda, wanita diwadahi dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan bahkan pada masa revolusi memiliki komponen taktis Divisi Panah (Pattiasina dan Sairin, 1996).

Dari 37.785.299 suara sah dan 257 kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 1955, partai ini beroleh 1.003.326 suara (2,66%) (Feith, 2007; lihat juga Tribunnews, 2022). Parkindo pernah berhasil mengorbitkan kadernya ke kursi penting pemerintahan (menteri) seperti Johannes Leimena dengan masa jabatan hampir 20 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Tokoh lainnya antara lain Albert Mangaratua Tambunan, Martinus Putuhena, Todung Sutan Gunung Mulia dan lain-lain yang juga pernah menduduki jabatan kenegaraan penting.

Awalnya pasca Maklumat No.X/Th.1945 (3 November 1945) para tokoh Protestan dan Katolik di Jakarta mengadakan sejumlah pertemuan untuk mendirikan sebuah partai. Tetapi kedua kelompok tak berhasil. Utusan Katolik mengundurkan diri karena harus membicarakannya terlebih dahulu kepada pimpinan Gereja meski kemudian berdiri Partai Katolik. Nama awal Parkindo ialah Partai Kristen Nasional yang pada Kongres I (6-8 Desember 1945) diubah menjadi Partai Kristen Indonesia.

Parkindo tidak tampil sebagai kontestan pemilu 1999. Tetapi Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Demokrasi Kasih Bangsa dan Partai Katolik Demokrat beroleh suara masing masing 0,36 %, 0,52 % dan 0,20 %. Pada pemilu 2004 Partai Damai Sejahtera (PDS) berhasil beroleh 2,13 % suara dan kemudian sukses memikat 10 partai Kristen (PDS, Parkindo, Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, PKDI, Partai Demokrasi

Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional) bergabung (2012). Tetapi pada pemilu 2014 PDS tidak lolos verifikasi. Dengan demikian hasrat tak ada partai Kristen yang berjalan sendiri untuk pemilu 2014 dan seterusnya tidak tercapai (Kabar Gereja, 2012).

Kongres Luar Biasa Parkindo 1945 (10 November 2020, Bandung) dihadiri 34 pengurus provinsi. Remy Yesaya Leimena (putra pendiri Parkindo Johannes Leimena) bersukacita jika Parkindo 1945 bisa kembali hadir di kancah politik nasional sebagaimana Careteker Ketua Umum Parkindo Alida Handau Lampe Guyer mendambakan partai ini pada Pemilu 2024 (Pelangi Indonesia, 2020).

Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna Indonesia) melalui Diskusi Daring (15/05/2020) mendengar pernyataan, masukan, kritik dan harapan para Ketum Ormas Kristen dan Lembaga Kristen soal peluang Partai Kristen pada pemilu 2024 beroleh kesimpulan pentingnya umat Kristen memiliki partai (Tigor, 2020).

Tetapi pada diskusi ke-11 Pewarna Indonesia “Partai Kristen, adakah peluang di tahun 2024 menjadi kontestan pemilu legislatif?”, Estefanus Belaati, Wasekjen Asosiasi Pendeta Indonesia (API), yang pernah menjadi caleg PSI, mengingatkan risiko mendirikan partai jika kelak ternyata tak beroleh dukungan signifikan. Sahat Sinurat Sekjen GAMKI dan mantan Ketua Umum GMKI berpendapat senada, dengan alasan bahwa 80% masyarakat Kristen kini sudah berpartai (Johanps, 2020).

Dalam arus politik identitas yang menguat saat ini, bagaimana Parkindo yang masih diharapkan tampil pada pemilu 2024 oleh para tokoh pendukungnya dengan begitu mendadak sontak bermetamorfosis menjadi PMI?

2.3. Tangan Besar di Balik PMI

Meski dinilai nihil agenda dan gerakan sehingga ada yang mempertanyakan perlu tidaknya dipertahankan (Asyraf dan Azzuhry, 2020), partai mahasiswa selama ini adalah kelembagaan demokrasi untuk membentuk pemerintahan mahasiswa di kampus.

Berbeda dengan partai mahasiswa internal kampus itu, kini, mengatasnamakan mahasiswa Indonesia, telah terbentuk sebuah partai politik. Berbeda dalam sifat, tujuan dan ruanglingkup, partai yang sudah terdaftar pada Kemenkumham itu sudah menjadi calon peserta pemilu.

Memeriksa kembali catatan yang ada, menurut laporan Faisal Aristama, Kamis, 02 September 2021, rupanya pernah beredar undangan deklarasi Partai Mahasiswa

Indonesia (PMI) yang dijadwalkan berlangsung hari Jum'at 3 September 2021 Pukul 14.30 WIB bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Aristama, 2021). Dalam undangan itu diterakan Sumpah Mahasiswa yang pernah dikumandangkan pada masa penjatuhan Orde Baru tahun 1998: "Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan".

Tetapi Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto menyebut PMI adalah perubahan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Tetapi Baroto tak sanggup menjelaskan latar belakang dan proses perubahan partai mencakup keseluruhan mulai dari nama, logo, hingga struktur kepengurusan partai dan AD/ART. Ia hanya menyebut bahwa PMI telah mendapat pengesahan. Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah didirikan kembali tahun 2000 Parkindo 1945 tak pernah lolos dalam verifikasi pemilu. Tentu saja menjadi pertanyaan apakah sebuah partai dapat dirubah tanpa melalui perhelatan tertinggi semisal kongres. Keterangan tentang hal itu masih sangat tertutup hingga hari ini (lihat Anwar, 2022).

2.4. Skenario Pemenangan Pemilu

Dengan memeriksa hal-hal ganjil dalam proses pendirian PMI, menjadi semakin menarik untuk menelisik motivasi di baliknya. Terlalu aneh jika PMI dipandang hanya sekadar diperlukan untuk memecah soliditas mahasiswa Indonesia dalam arus gerakannya memprotes pemerintahan Joko Widodo.

Atas nama solidaritas PMI tentu saja dengan mudah dapat direkrut mahasiswa di seluruh daerah dengan tujuan ganda, yakni menjadi pengurus PMI, calon anggota legislatif dan corong bersemangat untuk senantiasa mengeritik balik semua kritik yang dilemparkan kepada pemerintah oleh mahasiswa yang berseberangan dengan PMI.

Dengan demikian meski pun mengamankan pemerintahan tak harus dianggap sepele ditinjau dari kepentingan subjektif pemerintahan Joko Widodo, namun targetnya tak berlebihan untuk dikaitkan dengan hasrat "tangan besar" yang ingin mendisain perubahan Indonesia, paling tidak melalui pengorbitan orang ke kursi legislatif. Berikut akan dicoba mensimulasikannya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewakili 34 provinsi yang dipilih berdasarkan 80 Daerah Pemilihan (dapil) seluruhnya berjumlah 575 orang. PMI tidak ditargetkan sebatas lolos ketentuan nilai ambang batas perolehan

suara yang terus meningkat (2,5 % untuk pemilu 2009, 3,5% untuk pemilu 2014 dan 4% untuk pemilu 2019).

Karena kenyataan pemilu di negara-negara yang sedang belajar berdemokrasi masih belum begitu mempersoalkan penyelenggaraan berdasarkan nilai-nilai integritas yang disepakati secara universal, maka faktor-faktor non-elektoral (kecurangan) tetap masih akan dapat diandalkan untuk dijadikan modus dalam pemenangan pemilu. Selain besarnya faktor jumlah modus pilihan yang dapat dimainkan untuk memenangi pemilu, maka umumnya untuk negara dengan jumlah rakyat miskin yang massif seperti Indonesia intervensi “tangan besar” dapat dengan mulus menggunakan pendekatan transaksi (uang) nyaris tanpa risiko apa pun.

Sekiranya kadar keseriusan “tangan besar” di balik PMI hanya ingin menargetkan masing-masing 1 (satu) kursi dari semua dapil, maka diasumsikan kebutuhan alokasi anggaran yang harus dikeluarkan diyakini sudah tersedia. Secara sederhana katakanlah anggaran itu antara Rp 5 sampai 15 miliar. Dengan perhitungan menggunakan angka tertinggi (Rp 15 miliar) maka total kebutuhan alokasi anggaran untuk beroleh kursi DPR RI dari 80 dapil hanya Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Anggaran itu diasumsikan dapat tidak sekadar memastikan keterisian kursi-kursi yang diperlukan untuk 98 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, 416 Kabupaten dan 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah anggaran itu juga dapat memastikan peluang meraih tiga prestasi mengejutkan lainnya sekaligus.

Pertama, mendominasi kursi di beberapa daerah tertentu dan bahkan untuk mendudukan legislator PMI menjadi ketua DPRD. Kedua, apakah “tangan besar” di balik PMI sekaligus menargetkan jabatan Ketua DPR-RI?

Harus dibayangkan bahwa jika pun mesin politik di balik “tangan besar” itu gagal, setidaknya jabatan Wakil Ketua DPR-RI sudah di tangan. Tetapi jelas bahwa “tangan besar” di balik PMI akan mendapat kesulitan serius untuk menjalankan total agenda demokrasi, politik, dan ekonominya sesuai kepentingan oligarki yang terus disuarakan secara kritis oleh mahasiswa jika tak mampu mendominasi DPR-RI.

Ketiga, diakui atau tidak, karena tiadanya kemampuan setiap calon untuk membiayai saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka tingkat kepercayaan atas perolehan elektoral kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) masih terus dan selalu terbuka diperdebatkan selama penyelenggara pemilu (jajaran KPU dan Bawaslu, dari atas hingga ke bawah) tidak berintegritas.

Sama sekali ini bukan jenis tuduhan kosong, sebab sebagaimana tercermin dari pengalaman-pengalaman naif selama ini, banyak hal dapat ditunjukkan sebagai kelemahan yang tak semestinya. Antara lain dengan skenario berdasar logika rendah di balik kardus yang dapat disobek tetapi diberi gembok dan dengan misteri jumlah besar petugas yang meninggal pada pemilu 2019.

Karena dalam sistim ketatanegaraan pasca amandemen konstitusi telah menempatkan DPD RI sebagai salah satu kelompok “penting tak penting” di pusat kekuasaan politik Indonesia, maka “tangan besar” di balik PMI dapat sekaligus menugaskan semua mesin politiknya untuk menargetkan mayoritas kursi dari kalangan mahasiswa yang dapat dikendalikan.

Masih ada kebutuhan pembiayaan yang tak dapat ditiadakan, yakni bahwa setiap partai harus memiliki domisili/kantor pengurus pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Juga keperluan biaya kampanye. Jika menyadari motif “tangan besar” di balik pendirian PMI, pengadaan komponen biaya itu pun tak begitu sulit untuk dibayangkan. Bahkan mengalokasikan hingga Rp 5 triliun untuk misi di balik PMI bukanlah hal yang tak masuk dalam imaginasi.

Lalu siapakah (*profile*) anggota legislatif yang akan diorbitkan dari PMI? Tentu terlalu naif juga membayangkan seleksi tanpa kriteria ideologis yang untuk hal ini tentu saja tak aneh jika harus dikaitkan dengan PMI sebelum bermetamorfosis. Nilai-nilai perjuangan Parkindo 1945 adalah determinan utama di balik PMI.

Apakah nama-nama muslim yang dominan dalam pengurus pusat PMI akan diikuti untuk daerah dan bagaimana tingkat konsistensinya kelak ketika tiba saatnya menyusun daftar calon anggota legislatif? Apakah mereka yang muslim akan betah dalam perjalanan PMI ke depan?

Hal-hal seperti itu tidaklah begitu sulit untuk diselesaikan dalam dunia politik. Anggota dapat setiap saat dipecat. Atas nama urgensi loyalitas pengurus dapat diganti berulang kali dalam setahun dan anggota legislatif dapat dikenakan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Mahasiswa sebagai bagian integral dari dewasa muda jumlahnya sangat besar dan kerap dikaitkan dengan harapan tentang bonus demografi. Masalah yang mereka hadapi sangat jelas, di antaranya pengangguran. Setiap pengangguran di Indonesia dan di berbagai negara di dunia secara psikologis selalu dipandang menjadi kegagalan keluarga, bukan justru kegagalan sistem.

Karena itu harapan untuk tetap memiliki pendukung yang bergairah sangat besar bagi PMI, apalagi dibuat ketentuan bahwa setiap kader yang berhasil diorbitkan ke lembaga legislatif tidak dapat mengajukan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Ini akan menjamin sirkulasi dan distribusi kekuasaan di kalangan dewasa muda yang tak pernah terpikirkan oleh partai mana pun di dunia.

SIMPULAN

Mengetahui mendadak sontak dan begitu rapih pendirian partai ini sebagai metamorfosis Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945, tentu saja sah untuk dicurigai bahwa “tangan besar” di balik proses pasti telah memikirkannya dengan cermat dan matang. Akankah mereka berhasil? Tergantung pada bagaimana derajat integritas pemilu dilaksanakan nanti.

Karena itu PMI sebagai sebuah etalase baru untuk memicu partisipasi politik dewasa muda khususnya mahasiswa memang dalam pemilu akan terbentur oleh idealisme yang tetap terpelihara dan terutama karena tak merasa yakin ada partai mahasiswa yang dapat menyamai partai-partai para konglomerat atau jejaring sosial besar (keumatan, misalnya) dan bagi mereka semua itu bukan bagian dari proses demokratisasi.

Kecurigaan seperti itu memang tidak akan merata di antara warga, tetapi tensi tertingginya pasti dirasakan oleh kalangan mahasiswa idealis. Selain itu menyimak berbagai ekspresi gerakan yang tak terbatas pada kalangan mahasiswa belakangan ini, keberhasilan mahasiswa “menularkan” motivasi gerakan benar-benar semakin terlihat.

Golput yang digerakkan oleh kalangan dewasa muda Indonesia dengan mahasiswa sebagai pelopor itu sesungguhnya tidak pernah sirna meski sistim demokrasi dan pemilu begitu banyak memberi perhatian yang salah untuk berbagai upaya pelibatan (partisipasi) tertentu.

Terlalu menggelikan jika ada yang membayangkan bahwa PMI dibentuk untuk tujuan jangka pendek belaka, misalnya, untuk sekadar memecah kekuatan protes mahasiswa Indonesia yang bergelora akhir-akhir ini. Tujuan intervensi “tangan besar” dalam proses pembentukan PMI yang begitu mengejutkan itu tidak sebatas menyelamatkan pemerintahan Joko Widodo dari kekhawatiran diturunkan dari kursi kepresidenan sebelum berakhir masa jabatan.

“Tangan besar” itu juga ingin memastikan dua kemungkinan peluang besar jangka menengah dan panjang yang malah jauh lebih penting. Pertama, penundaan pemilu

2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden melebihi ketentuan konstitusi yang masih berlaku sekarang (dua periode); dan atau kedua, mendudukkan orang-orang pilihan yang amat energik mengemban misi “tangan besar” di balik partai ini.

Mereka sangat diperlukan untuk memastikan desain sistim demokrasi, politik dan ekonomi Indonesia ke depan yang secara teoritis memihak kepada pengawetan kepentingan “tangan besar”. Siapakah “tangan besar” itu? Oligarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornils, I. (2014). 'The Struggle Continues': Rudi Dutschke's Long March. Dalam: Gerard J. D., 2014. *Student Protest: the Sixties and After*. Routledge, hh. 100-114.
- Cole, D. dan Dempsey, J. X. (2002). *Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties in the Name of National Security*. New Press.
- Downs, D. A. (2005). *Restoring Free Speech and Liberty on Campus*. The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell University Press, Equinox Publishing.
- Hubermas, J. (1970). *Toward A Rational Society: Student Protest, Science, and Politics*. Beacon Press.
- Klime, Martin. (2010). *The Other Alliance: Student Protest in West Germany and the United States in the Global Sixties*. Princeton University Press.
- Kutler, S. I. (1992). *The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon*. W. W. Norton & Company.
- Sairin, W. dan Pattiasina, J. M. (Eds.). (1996). *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah tentang Perkawinan di Lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia* (Cetakan 2). BPK Gunung Mulia
- So, A. Y. (1990). *Social Change and Development: Modernization, Dependency and World-System Theories*. Sage.
- Sommer, J. W. (1995). *The Academy in Crisis: The Political Economy of Higher Education*. Transaction Publishers, Rutgers.
- Thompson, H. S. (1971). *Fear and Loathing in Las Vega: A Savage Journey to the Heart of the American Dream*. Random House.

Website

- AAUP. (2003, October). *Academic Freedom and National Security in a Time of Crisis*. American Association of University Professors. <https://www.aaup.org/report/academic-freedom-and-national-security-time-crisis>
- Anwar, Ananda Perdana. (2022, April 25). *Kemenkumham: Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia Perubahan dari Parkindo 45*. Poros Kalimantan. <https://poroskalimantan.com/kemenkumham-kemunculan-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-45/>
- Kabar Gereja. (2012, September 28). *10 Partai Politik Kristen Berencana Meleburkan Diri ke Partai Damai Sejahtera (PDS)*. Kabar Gereja. <https://www.gereja.in/2012/09/10-partai-politik-kristen-berencana.html>
- Pelangi Indonesia. (2020, November 10). *Sah, Ketum Careteker Buka Kongres Luar Biasa Parkindo 1945*. Pelangi Indonesia. <https://pelangiindonesia.id/detailpost/sah-ketum-careteker-buka-kongres-luar-biasa-parkindo-1945>
- Tribunnews. (2022, April 27). *PANGGUNG DEMOKRASI: Kontroversi Partai Mahasiswa*. Akun Tribunnews di Youtube.com. <https://www.youtube.com/watch?v=7nkFH9R2lPY>.
- Wikipedia. *Sinar Harapan*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Harapan
- _____. *Johannes Leimena*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Johannes_Leimena